



**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGATURAN DAN
PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

TESIS

MUHAMMAD ASY'ARI

1620622122

**UNIVERSITAS PEMBAGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2019**



**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGATURAN DAN
PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

MUHAMMAD ASY'ARI

1620622122

UNIVERSITAS PEMBAGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Asyari
NRP : 1620622122
Tanggal : 7 Mei 2019

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 7 Mei 2019

Yang Menyatakan,



Muhammad Asy'ari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Asyari
NIM : 1620622122
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Mei 2019
Yang menyatakan,



Muhammad Asy'ari

PENGESAHAN

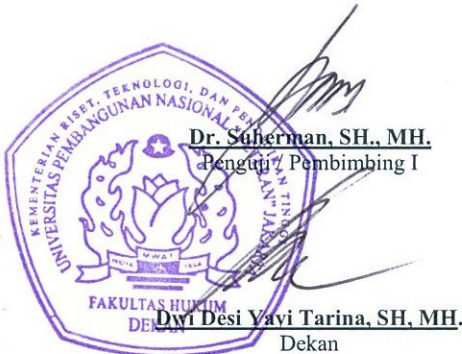
Tesis diajukan oleh

Nama : Muhammad Asy'ari
NPM : 1620622122
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terkait Pengaturan Dan Pelaksanaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dengan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Dr. Erni Agustina, SH, SpN.
Ketua Penguji



Dr. Arrisman, SH., MH.
Sekretaris / Pembimbing II



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH.
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Mei 2019

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Muhammad Asy'ari

Abstrak

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah ditandatangani. Perpres ini dikeluarkan karena pemerintah ingin meningkatkan investasi di Indonesia melalui kemudahan proses, kemudahan birokrasi dalam bidang ketenagakerjaan khususnya Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan Perpres ini, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Berdasarkan uraian tersebut, maka metode penelitian adalah yuridis normatif, dalam rangka penggalan norma-norma hukum yang terdapat dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan peraturan lainnya.

Penerbitan Perpres ini menimbulkan penolakan yang masif dari unsur pekerja karena pihak pekerja/buruh menganggap Perpres ini memfasilitasi dan melegitimasi masuknya TKA untuk bekerja sehingga serbuan dari TKA terutama TKA *unskill worker* tersebut mengancam lapangan kerja yang seharusnya dapat dilakukan oleh Pekerja lokal.

Sementara itu pihak Pemberi Kerja TKA justru mengapresiasi Perpres ini, Pemberi Kerja TKA menilai Perpres ini bukan merupakan produk peraturan yang melonggarkan masuknya TKA namun hanya mempercepat dan menyederhanakan proses TKA yang semula berbelit-belit sehingga diharapkan akan menumbuhkan iklim investasi yang baik di Indonesia.

Lantas bagaimanakah sesungguhnya pengaturan penggunaan TKA setelah berlakunya Perpres ini, dan bagaimana Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Dit. PPTKA) melaksanakan Perpres dalam rangka pelayanan penggunaan TKA ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya? Jika tidak apa penyebabnya.

Kata Kunci : Perpres, Penggunaan TKA, Pelaksana.

JURIDICAL REVIEW RELATED TO REGULATION AND IMPLEMENTATION OF USE OF FOREIGN LABOR USE WITH THE ENTRY OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 20 OF 2018 ABOUT USE OF FOREIGN LABOR

Muhammad Asy'ari

Abstract

Presidential Regulation (Perpres) Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers (TKA) has been signed. This Presidential Regulation was issued because the government wanted to increase investment in Indonesia through the ease of process, ease of bureaucracy in the field of labor, especially Foreign Workers.

Based on this Perpres, every employer who employs TKA must prioritize the use of Indonesian workers in all types of positions available. In the event that the position referred to has not been able to be occupied by Indonesian workers, the position may be occupied by TKA. Based on this description, the research method is normative juridical, in the context of extracting legal norms contained in Presidential Regulation Number 20 Year 2018 concerning the Use of Foreign Workers and other regulations.

Issuance of this Presidential Regulation raises massive rejection from workers because the workers / laborers consider this Presidential Regulation facilitating and legitimizing the entry of foreign workers to work so that the invasion of TKA, especially TKA unskilled workers threatens employment that local workers should be able to do.

Meanwhile the TKA Employers appreciated this Perpres, the TKA Employers considered that this Perpres was not a regulatory product that loosened the entry of Foreign Workers but only accelerated and simplified the TKA process which was originally complicated so that it was expected to foster a good investment climate in Indonesia.

Then what is the real regulation of the use of foreign workers after the enactment of this Presidential Regulation, and how the Directorate of Foreign Workers' Use Control (Dit. PPTKA) implements the Presidential Regulation in the context of the service for the use of TKA, is it in accordance with the purpose of its establishment? If not what causes it.

Keywords: Perpres, Use of Foreign Workers, Implementers.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak November 2018 sd. Maret 2019 ini adalah ***Tinjauan Yuridis Terkait Pengaturan Dan Pelaksanaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dengan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing***”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dr. Erni Agustina, SH, SpN, selaku Kajur Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH, selaku Kaprogdi Program Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Prof. Dr. Jeane Neltje S.H.,M.H.,APU, selaku ketua penguji.
6. DR. Suherman, SH., MH. selaku dosen pembimbing I.
7. DR. Arrisman, SH., MH. selaku dosen pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Sekretariat Program Hukum Bisnis Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas kesabaran dan ketulusan hati dalam proses pelaksanaan belajar dan mengajar.
9. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu cinta kasih, mendukung dan memberikan semangat selama penyusunan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Istriku tersayang, Zahra Fitri Andini, yang selalu mendukung, menemani dan memberikan semangat selama penyusunan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Sahabatku, sekelas di program studi Hukum Bisnis, yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, nasehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

12. Rekan-rekan Angkatan 2016 yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta mengutamakan Jiwa Korsa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
13. Rekan-rekan Angkatan 2016 Program Hukum Bisnis Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang selalu kompak dan memberikan inspirasi, *sharing*, serta kesejukan selama perkuliahan awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta, 7 Mei 2019

Penulis,

Muhammad Asy’ari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

I.1	Latar Belakang.....	1
I.2	Perumusan Masalah	7
I.3	Tujuan Penelitian	7
I.4	Manfaat Penelitian	7
I.5	Kerangka Teori dan Konseptual	8
I.5.1	Kerangka Teori	8
I.5.2	Kerangka Konseptual.....	19
I.6	Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1	Tenaga Kerja Asing di Indonesia	23
II.1.1	Latar Belakang dan Filosofi Penggunaan TKA di Indonesia.....	23
II.1.2	Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA).....	23
II.1.3	Tujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	24
II.1.4	Penempatan Tenaga Kerja Asing	25
II.1.5	Tenaga Kerja Pendamping TKA.....	25
II.2.	Tenaga Kerja Asing dan Landasan Pengaturan TKA di Indonesia.....	26
II.2.1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	26
II.2.2	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018	28

II.3.	Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA	32
II.3.1	Profile Kelembagaan Dit PPTKA	32
II.3.2	Struktur Organisasi Dit. PPTKA	34
II.3.3	Profil Pegawai Dit. PPTKA.....	35
II.3.4	Tugas dan Fungsi.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

III.1	Jenis Penelitian	37
III.2	Spesifikasi Penelitian	38
III.3	Sumber Data	39
III.4	Teknik Pengumpulan Data	40
III.5	Analisis Data	41

BAB IV PELAKSANAAN PENGGUNAAN TKA DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TKA

IV.1	Pengaturan Penggunaan TKA Dengan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA	43
IV.1.1	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.....	43
IV.1.2	Analisis Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	63
IV.2	Pelaksanaan Penggunaan TKA dengan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA Pada Dit. PPTKA	65
IV.2.1	Tinjauan Umum Kebijakan Pemerintah. dan Implementasi dalam penggunaan TKA.....	65
IV.2.2	Aturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018	66
IV.2.3	Pembangunan Sistem Penggunaan TKA yang Terintegrasi	69
IV.2.4	Pelaksanaan Perizinan Penggunaan TKA pada Dit.PPTKA	70
IV.2.5	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TKA	79
IV.2.6	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan TKA	82

BAB V PENUTUP

V.1	Kesimpulan.....	85
V.2	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi jumlah Pegawai	35
Tabel 2	Rekapitulasi jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	35
Tabel 3	Rekapitulasi jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan	35
Tabel 4.	Perbandingan Pengaturan antara Perpres No 72 Tahun 2014 dengan Perpres No 20 Tahun 2018	45
Tabel 5.	Aturan Pelaksanaan Perpres No 20 Tahun 2018	67
Tabel 6.	Pelayanan Perizinan Penggunaan TKA.....	73
Tabel 7.	Tugas dan Fungsi Pelaksana pelayanan perizinan pada Direktorat PPTKA..	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peraturan yang Mengatur Penggunaan TKA dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018	20
Gambar 2. Proses Penggunaan TKA sesuai Perpres No 20 Tahun 2018	21
Gambar 3. Struktur organisasi Dit.PTKA	34
Gambar 4. Alur proses perizinan penggunaan TKA	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA
- Lampiran 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA
- Lampiran 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing
- Lampiran 4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Pengawasan TKA